

Sawahlunto

**BerAKHLAK**  
Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#bangga  
melayani  
bangsa

# **CROSSTUTTING 2024-2026**

## **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



**PEMERINTAH  
KOTA SAWAHLUNTO**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto  
Inscribed on the World Heritage List in 2019



World  
Heritage  
Convention



**GEOPARK  
SAWAHLUNTO**

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

## I. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

Dalam beberapa kajian belakangan ini metode crosscutting dalam manajemen kinerja dinilai urgent karena struktur pyramid kinerja ataupun pohon kinerja terbatas pada struktur hirarki internal yang efektif untuk menunjukan siapa, berbuat apa secara hirarki kinerja, namun pada beberapa kasus, kinerja sangat dipengaruhi dan mempengaruhi lintas fungsi di luar hirarki struktur. Merujuk pada Jacques Lemonnier (2014) dalam bukunya *"The Cross-Cutting Manager"*, disampaikan *"that the cross-cutting management is exercised horizontally and not vertically, which implies that it is not a priori based on a hierarchical link, and that it is generally "trans-trades, trans-departments, trans-poles" and therefore cross- cultures"*. Analisa *Cross cutting* memungkinkan membaca kinerja yang berlintangan dan beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Isu strategis khususnya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin dinamis dan rumit maka relevan upaya identifikasi melalui *cross cutting* kinerja dilakukan demi efektifitas dan efesiensi pencapaian atas target-target yang telah ditetapkan, upaya ini pun mendorong pemangku kebijakan pada tingkat Perangkat Daerah untuk memahami lingkup pekerjaanya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja .

## II. PEMBAHASAN ANALISA CROSSCUTTING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto memiliki sasaran strategis berjumlah 3 yaitu:

1. Meningkatnya Antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan Keteraman masyarakat di Kota Sawahlunto dengan indikator Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Sosial.
2. Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik dengan indikator Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Politik.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indicator Nilai SAKIP Bakesbangpol

Dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk mencapai indikator tersebut terdapat beberapa kebijakan/aspek cross cutting sebagai berikut :

**Tabel Cross Cutting Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto**

No	Sasaran	Indikator	Kebijakan/Aspek	Unit Kerja	Ket
1	Meningkatnya Antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan Keteraman masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	Pembinaan kepada masyarakat tentang kerukunan antar umat beragama dan pencegahan ,pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Dinas Pendidikan, Kecamatan FKUB, BNN	

No	Sasaran	Indikator	Kebijakan/Aspek	Unit Kerja	Ket
			Perencanaan anggaran pemberian bantuan Hibah kepada FKUB	BPKAD	
			Pencairan anggaran pemberian bantuan Hibah kepada FKUB	BPKAD	
			Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Hibah FKUB	Inspektorat, BPKAD	
2	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik	Persentase Penyelesaian Potensi Konflik Politik	Sosialisasi kepada Pemilih pemula melalui pendidikan politik	Dinas Pendidikan. Bawaslu, KPU	
			Pembinaan kepada masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) tentang 4 Pilar kebangsaan dan Ideologi pancasila	Kecamatan	
			Perencanaan anggaran pemberian bantuan (Hibah) kepada partai politik dan instansi Vertikal	BPKAD	
			Pencairan anggaran Hibah partai politik dan instansi Vertikal	BPKAD	
			Evaluasi Terhadap pelaksanaan kegiatan dan Pertanggungjawaban Hibah	BPKAD, Inspektorat	

No	Sasaran	Indikator	Kebijakan/Aspek	Unit Kerja	Ket
			Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) partai politik dan instansi Vertikal		
			Koordinasi dengan instansi vertical untuk menjaga stabilitas situasi dan kondisi daerah	Instansi Vertical	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bakesbangpol	Keselarsan dokumen perencanaan	Barenlitbangda	
			Capaian kinerja dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan	Barelitbangda	
			Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Barenlitbangda, Bagian organisasi	
			Evaluasi terhadap Laporan Kinerja	Inspektorat	
			Evaluasi Terhadap Hasil Evaluasi AKIP	Inspektorat	
			Koordinasi dengan Bagian Organisasi mengenai pelaporan	Bagian Organisasi	

# CROSSCUTTING

## ● Program Unggulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- ❑ Pembinaan dan Sosialisasi terkait Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembsauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENGUATAN  
IDEOLOGI PANCA SILA  
DAN KARAKTER  
KEBANGSAAN

- ❑ Pembinaan dan Monitoring terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

PROGRAM PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN  
KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, DAN BUDAYA

- ❑ Sosialisasi, Pembinaan dan Pendataan ORMAS, ORPEM, LSM, serta Pemberian Bantuan Hibah

PROGRAM  
PEMBERDAYAAN DAN  
PENGAWASAN  
ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN

- ❑ Pendidikan Politik, Sosialisasi UU Pemilu, dan Pemberian Banpol

PROGRAM PENINGKATAN  
PERAN PARTAI POLITIK DAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI  
PENDIDIKAN POLITIK DAN  
PENGEMBANGAN ETIKA  
BERTA BUDAYA POLITIK

DENI  
CENI  
Terhadap  
ATHG

PROGRAM  
PENINGKATAN  
KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN  
PENINGKATAN  
KUALITAS DAN  
FASILITASI  
PENANGANAN  
KONFLIK SOSIAL

PENYELESAIAN  
KONFLIK

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.



# PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota WisataTambang yang Berbudaya

## MENINGKATKAN FASILITAS PELAYANAN UMUM

VISI

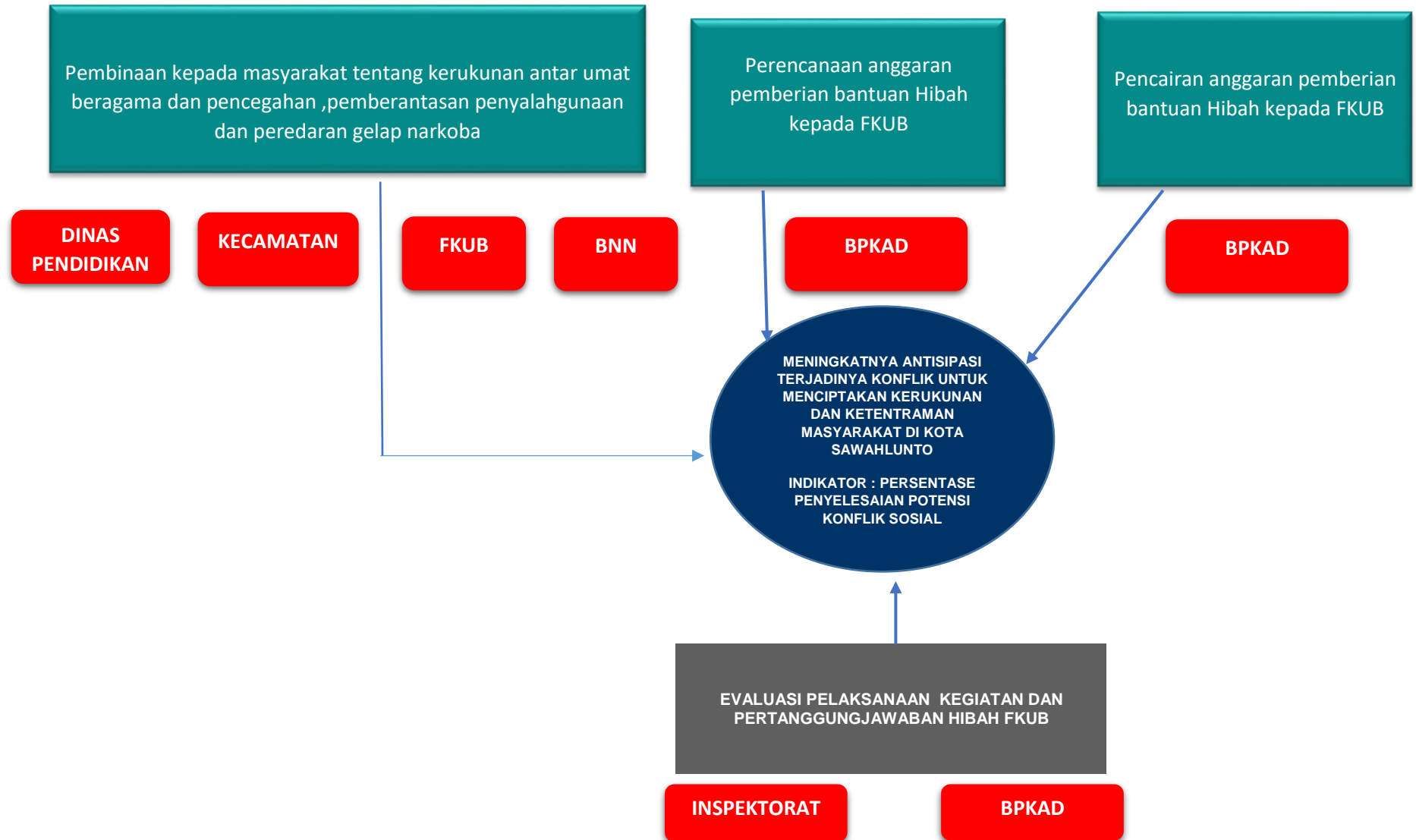
MISI

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	OPTIMALISASI PENANGANGANAN POTENSI KONFLIK POLITIK	MENINGKATNYA ANTISIPASI TERJADINYA KONFLIK UNTUK MENCIPTAKAN KERUKUNAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KOTA SAWAHLUNTO	SASARAN
NILAI SAKIP BAKESBANGPOL	100%	PERSENTASE PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK SOSIAL	INDIKATOR KINERJA
62,19%	PERSENTASE PENYELESAIAN POTENSI KONFLIK POLITIK	100%	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	<p>Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <p>Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitasi Dalam i Penanganan Konflik Sosial</p>	PROGRAM
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>4. Penggadaan Barang Milik Daerah</li> <li>5. Penunjang urusan Pemerintah Daerah</li> <li>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>	KEGIATAN

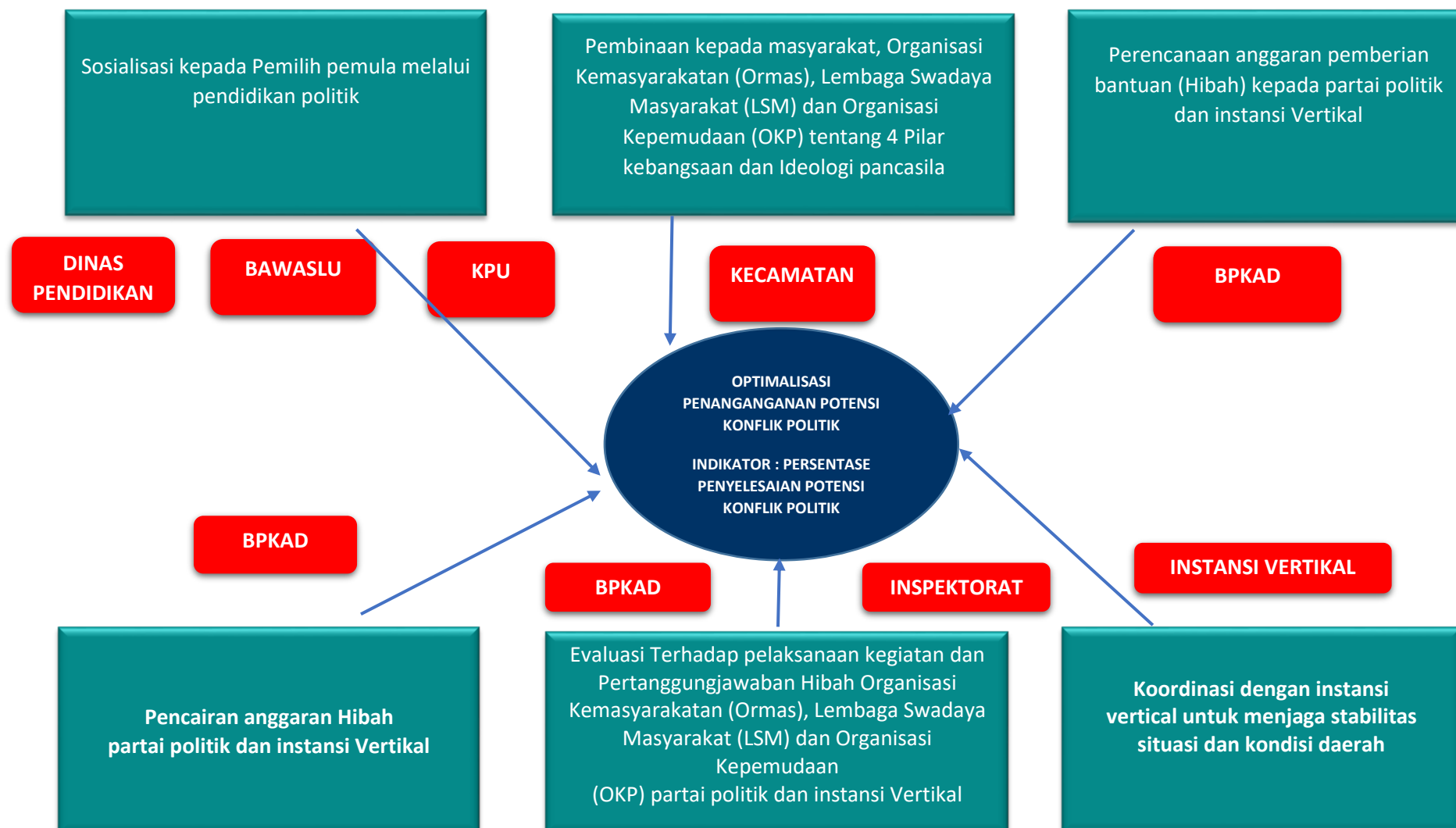
SEKRETARIAT	BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS SUB. BID. POLDAGRI	BIDANG POLDAGRI DAN ORMAS SUB. BID. ORMAS	BIDANG KESBANG SUB, BID. KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KOMFLIK	BIDANG KESBANG SUB, BID. IDEOLOGI WASBANG DAN KETAHANAN EKOSOSBUD	BIDANG KESBANG SUB, BID. KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANANK OMFLIK	UNIT KERJA
2.489.653.932	644.818.95	69.887.200	91.737.800	1.104.054.500	543.653.200	ANGGARAN



## CROSSCUTTING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA KOTA SAWAHLUNTO



## CROSSCUTTING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA KOTA SAWAHLUNTO



# CROSSCUTTING KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA KOTA SAWAHLUNTO



### III. PENUTUP

Berdasarkan Analisa *Crosscutting* Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja di pegaruhi faktor-faktor yang beririsan ataupun proses pendukung dari eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KotaSawahlunto, hal ini menunjukan dinamika kinerja yang saling bertautan dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah unit-unit kerja yang bertautan dengan sasaran/indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto:

1. BAPPELITBANGDA
2. BPKPD
3. INSPEKTORAT
4. KPU 5.  
BAWASLU
6. DINAS PENDIDIKAN
7. KECAMATAN
8. INSTANSI VERTIKAL
9. FKUB
- 10.BNN

Kendati sinergitas kinerja telah dilaksanakan dengan baik, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan sinergitas kinerja yang berdampak pada hasil, agar stake holder pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto yang memangku kinerja terkait terus memperkuat koordinasi dengan unit kerja yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efesien agar mencermati hal-hal kebijakan/aspek yang beririsan atau telah dilaksanakan oleh unit kerja lain sehingga dapat dihindari adanya pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan dengan output yang sama (double pekerjaan/kegiatan).

Hal lain yang harus terus diupayakan adalah melakukan kegiatan bersama secara efektif diantaranya dengan melakukan event perencanaan lingkup pekerjaan yang sekaligus melibatkan pihak -pihak terkait, tidak melakukan perencanaan secara mandiri di setiap pihak.

Sawahlunto, Januari 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAWAHLUNTO**



**Ir. YULIANTI**

NIP. 19670707 199401 2 003

